

**PROSES PENYERAHAN PENGELOLAAN PASAR
NAGARI BANDAR BUAT KE PEMERINTAH
KOTA PADANG**

SKRIPSI



Oleh

HALIM PERDANA TRIJA

BP. 1310812016

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2018

**PROSES PENYERAHAN PENGELOLAAN PASAR
NAGARI BANDAR BUAT KE PEMERINTAH
KOTA PADANG**

SKRIPSI



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2018

ABSTRAK

Halim Perdana Trija, BP 1310812016. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Proses Penyerahan Pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang. Pembimbing I Drs. Ardi Abbas, MT dan Pembimbing II Drs. Rinaldi Ekaputra, M.Si. Jumlah halaman skripsi adalah 90 halaman.

Telah ada kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan Nagari Lubuk Kilangan untuk mengelola Pasar Bandar Buat yang sebelumnya merupakan pasar nagari yang terletak di Lubuk Kilangan. Namun kesepakatan tersebut tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang. Tujuan khusus penelitian ini adalah mendeskripsikan tahapan-tahapan penyerahan pengelolaan Pasar Nagari Bandar Buat ke Pemerintah Kota Padang dan mendeskripsikan hasil kesepakatan antara aktor yang terlibat dengan Pemerintah Kota Padang.

Teorinya adalah teori konflik oleh Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa, penyebaran otoritas yang tidak merata merupakan hal yang mendorong terciptanya konflik sosial. Otoritas yang dipegang oleh tiap golongan masyarakat memiliki kekuatan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengambilan informan dengan cara *snowballing* dan pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk menjawab tujuan khusus satu, terdapat dua tahap. Tahap pertama, tahap Inpres, penyerahan pengelolaan didasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 1981, tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar. Nagari Lubuk Kilangan menganggap pengelolaan hanya 15 tahun. Kenyataannya setelah waktu tersebut pasar tetap dikelola oleh Pemerintah Kota Padang. Tahap kedua, setelah inpres, ketika pihak Nagari Lubuk Kilangan mempertanyakan status pengelolaan pasar yang seolah-olah sudah menjadi milik Pemerintah Kota Padang saja. Untuk menjembatani masalah tersebut, diadakan pertemuan pada tahun 2006. Hasil pertemuan disepakati bahwa, pembagian hasil antara Nagari Lubuk Kilangan dengan Pemerintah Kota Padang sebesar 45%:55% untuk investasi, sedangkan untuk hasil pengelolaan sebesar 25%:75%. Tujuan khusus dua, ada tiga kesepakatan yaitu masalah pembagian hasil pengelolaan pasar, hasil investasi, dan pembebasan tanah seluas 2000 M² oleh pihak investor. Ketiga kesepakatan tersebut tidak terlaksana disebabkan adanya pelanggaran dari pihak nagari yang tidak menyerahkan pembagian hasil pengelolaan dan kekuasaan Pemerintah Kota Padang seperti yang dijelaskan oleh Dahrendorf tentang penyebaran otoritas yang tidak merata dan merupakan pemicu terciptanya konflik sosial.
Kata Kunci: Pengelolaan, Penyerahan, Otoritas, Kesepakatan.

ABSTRACT

Halim Perdana Trija, BP 1310812016. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Andalas, Padang. Thesis title: Process of Submission Management of Pasar Nagari Bandar Buat to The City Government Padang. Supervisor I Drs. Ardi Abbas, MT and Supervisor II Drs. Rinaldi Ekaputra, M,Si. The number of pages of this thesis is 90 pages.

There is an agreement between the Government of Padang City and Nagari Lubuk Kilangan to manage Bandar Bandar Buat Market which previously was a nagari market located in Lubuk Kilangan. But the agreement is not appropriate in its implementation. This study aims to describe the Process of Submission Management of Pasar Nagari Bandar Buat to The City Government Padang. The specific purpose of this study is to describe the stages of the delivery of the management of Pasar Nagari Bandar Buat to the City Government of Padang and to describe the agreement between the actors involved with the Padang City Government.

His theory is the theory of conflict by Ralf Dahrendorf stating that, the unequal distribution of authority is the cause of social conflict. The authority held by each group of people has different powers. This research uses qualitative method with descriptive type. Taking informants by snowballing and data collection used observation techniques, in-depth interviews and documentation studies.

The results concluded that to answer the special purpose one, there are two stages. The first phase, the Inpres stage, the handover of management is based on Presidential Instruction (Inpres) no. 8 of 1981, on Credit Development Assistance and Market Restoration. Nagari Lubuk Kilangan regards management only 15 years. In fact after that time the market is still managed by the Padang City Government. The second phase, after the Inpres, when Nagari Lubuk Kilangan questioned the status of market management that seems to have belonged to the Government of Padang City only. To bridge the issue, a meeting was held in 2006. The result of the meeting was agreed that the division of yield between Nagari Lubuk Kilangan and the City Government of Padang was 45%: 55% for investment, while for the management result was 25%: 75%. Special purpose two, there are three agreements, namely the issue of market share management results, investment returns, and land acquisition of 2000 M² by the investor. These three agreements were not implemented due to violations of the nagari who did not give up the share of management and power of the Padang City Government as explained by Dahrendorf about the unequal distribution of authority and the trigger for the creation of social conflict.

Keywords: Management, Submission, Authority, Agreement.